



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dapat menyusun Laporan Kinerja BPK Perwakilan Jawa Barat Tahun 2021, yang merupakan laporan atas Pencapaian Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawabannya atas tugas pokok dan fungsi dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/ Lembaga dan (e) unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Tahun 2021 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah ditetapkan dan di tandatangani pada Desember 2021 di Jakarta. Dalam PK tersebut tercantum target-target Indikator Utama Kinerja (IKU) yang harus dicapai oleh Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam Tahun 2021.

Dalam pelaksanaannya, kami telah berusaha secara maksimal dengan memanfaatkan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan serta sarana dan prasarana kerja untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan yang telah kami rencanakan guna mencapai target IKU yang telah ditetapkan.

Laporan Pencapaian Kinerja ini diharapkan sudah menggambarkan kondisi riil pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK dalam melaksanakan mandat dan amanat Undang-Undang yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun strategi yang tepat untuk merencanakan kegiatan dalam tahun berikutnya sehingga semua IKU yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan target.

Akhir kata, tugas BPK RI sebagai Lembaga Negara yang mendapat mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, hanya dapat dilaksanakan dengan mewujudkan BPK RI yang bebas, mandiri dan profesional. Selanjutnya Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari BPK RI yang tidak terpisahkan akan terus meningkatkan perannya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara serta mewujudkan reformasi birokrasi yang berhasil guna.

Bandung, Januari 2022
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Ttd.

Agus Khotib
NIP 19680830 198903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	3
D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	4
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA (PK) BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT	6
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	6
B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT	27
A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	27
B. Realisasi Anggaran.....	48
BAB IV PENUTUP.....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis 2020-2024 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada 8 September 2021. Laporan Kinerja ini berisi pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 ini juga merupakan salah satu dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Auditorat Utama Keuangan Negara V Tahun 2021 dan Laporan Kinerja BPK RI Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

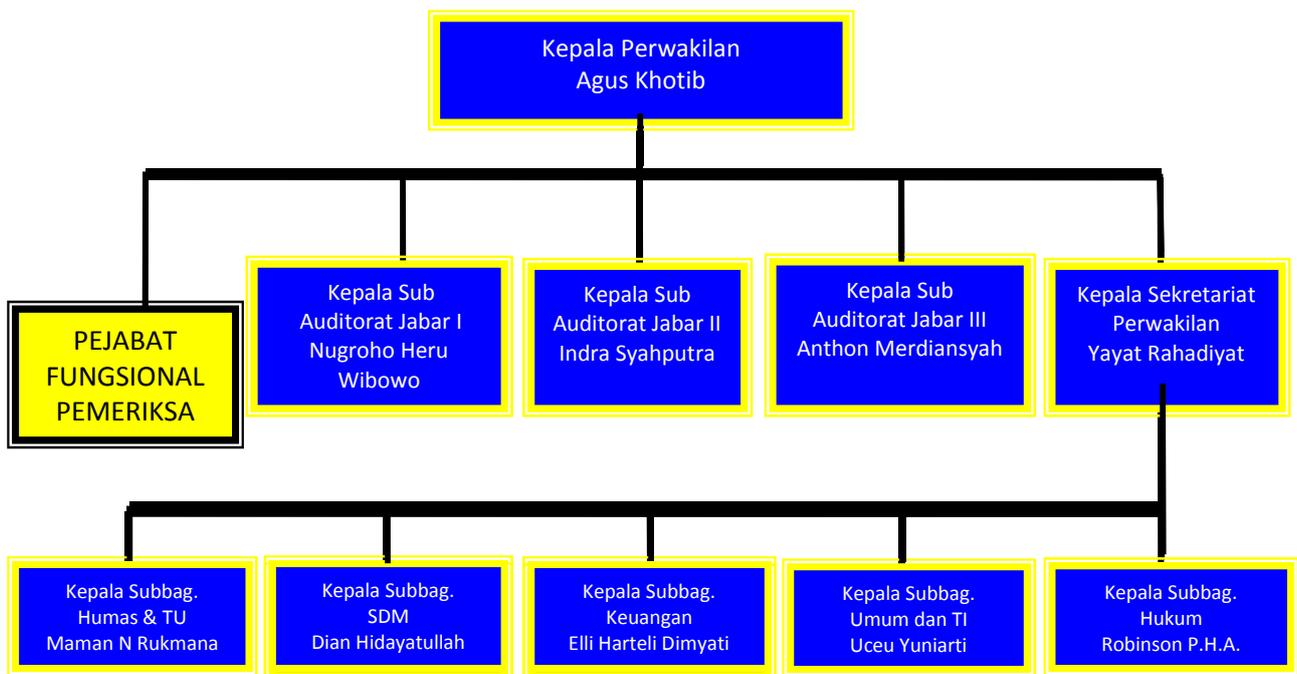
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan Keputusan tersebut, tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditorat Keuangan Negara (AKN).

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Jawa Barat dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Jawa Barat berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Jawa Barat;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh Pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan aparat pengawas internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
13. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi umum;

17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat; dan
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. Subauditorat Jawa Barat I

Sub Auditorat Jawa Barat I, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Bandung Barat serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

2. Subauditorat Jawa Barat II

Sub Auditorat Jawa Barat II, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, Kabupaten

Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Sumedang, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

3. Subauditorat Jawa Barat III

Sub Auditorat Jawa Barat III, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

4. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sekretariat Perwakilan membawahi Subbag Humas dan Tata Usaha, Subbag SDM, Subbag Keuangan, Subbag Umum dan Teknologi Informasi dan Subbag Hukum.

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat per bulan Desember 2021 berjumlah 183 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 3 orang Kepala Subauditorat, 1 orang Kepala Sekretariat Perwakilan, 5 orang Kepala Subbagian, 129 orang pemeriksa dan 44 orang staf penunjang pendukung (Sekretariat) dan 32 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) . Berdasarkan Berita Acara Penginputan RKP dan RKSP 2021 pada tanggal 27 November 2020, Pagu anggaran Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2021 sebesar Rp40.326.729.000,00. Namun karena adanya kebutuhan untuk penanggulangan pandemi Covid-19, dan akibat perubahan status dan komposisi pegawai, maka pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan Pagu Anggaran. Pada tanggal 16 Desember 2021 telah disahkan revisi DIPA TA 2021 ke-9 oleh Direktur Jenderal Anggaran sesuai Nomor SP-DIPA 004.01.2.450799/2021 Pagu Anggaran TA 2021 menjadi Rp39.066.240.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 38.879.408.466,00 atau 99,52% dari total anggaran.

Alokasi pagu anggaran tersebut terdistribusi pada empat layanan, yaitu (1) Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara, (2) Layanan Manajemen Internal Perwakilan, (3) Layanan Sarana dan Prasarana Internal dan (4) Layanan Perkantoran. Secara ringkas, perbandingan pagu dan penyerapannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tahun	Layanan	Anggaran (Rp)	Revisi ke-9 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	19.029.954.000,00	18.345.794.000,00	18.274.327.944,00	99,61

Tahun	Layanan	Anggaran (Rp)	Revisi ke-9 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Manajemen Internal Perwakilan	1.664.990.000,00	1.519.717.000,00	1.517.141.703	99,83
	Sarana dan Prasarana Internal	746.789.000,00	1.092.027.000,00	1.092.020.700,00	100
	Perkantoran	18.884.906.000,00	18.108.702.000,00	17.995.918.119,00	99,38
	Total DIPA 2021	40.326.639.000,00	39.066.240.000,00	38.879.408.466,00	99,52

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA (PK) BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik dengan fokus kepada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, penyempurnaan proses bisnis utama, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 - 2024 berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 8 September 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020-2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK untuk periode tahun 2020-2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020-2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespon dampak bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini merupakan langkah yang ditujukan agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 - 2024 memuat visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK dalam melaksanakan mandat dan amanat Undang-Undang yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Visi : Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

Misi :

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan.
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya

Berdasarkan visi dan misi tersebut, terdapat tujuan strategis yang akan dicapai pada akhir pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020 – 2024, yaitu:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menetapkan satu Sasaran Strategis (SS) periode 2020-2024, yaitu:

“Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan, dan penyelesaian ganti kerugian negara yang merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ingin menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang sesuai dengan standar. Melalui peningkatan mutu pemeriksaan, maka diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja BPK. Hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dapat menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis ini, area penyempurnaan difokuskan pada penyusunan metodeologi pemeriksaan yang kuat, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara, dan peningkatan kualitas SDM pemeriksaan.

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menetapkan indikator-indikator sebagai berikut” (1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; (2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; (3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; (4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; (5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; (6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; (7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; (8) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); (9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; (10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; (11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; (12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan (13) Tingkat Kinerja Anggaran.

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyusun enam strategi yang ditetapkan pencapaian targetnya sebagai berikut:

SS	Strategi
SS 1	Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis
SS 2	Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif
SS 3	Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara
SS 4	Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara
SS 5	Menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara
SS 6	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan

Target Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) pada setiap tahunnya selama periode lima tahun. Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 – 2024, yaitu:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 – 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3 Persentase TLRHP	75%	75%	75%	75%	75%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%

B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (d.h.i. Auditor Utama Keuangan Negara V) pada bulan Desember 2020. Berikut adalah IKU BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021, yaitu :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja, serta Anggaran Tahun 2021
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)		(3)
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi Rp40.326.729.000,00	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)		(3)
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,5%

Dalam rangka mencapai target kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2021, yang menetapkan target kinerja setiap triwulanan selama satu tahun. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKPR/RKSP	
(1)	(2)		(3)	TW I	TW II	TW III			TW IV
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif								
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi								
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	70%	100%	Desember	Triwulan I:- Triwulan II: 1. Melaksanakan revidu berjenjang dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa (PFP) atas setiap tahapan pemeriksaan (quality control/QC) atas LKPD TA 2020 sesuai standar dan terdokumentasi 2. Melaksanakan serah terima kertas kerja pemeriksaan atas LKPD TA 2020 dari pemeriksa kepada Kepala Subauditorat (pejabat struktural pemeriksa/ PSP) setelah dilakukan peer	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
								<p><i>review</i> antara tim pemeriksa dan di-reviu oleh PSP sesuai persyaratan <i>quality assurance/QA</i></p> <p>3. Melaksanakan <i>review</i> berjenjang dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa (PFP) atas setiap tahapan pemeriksaan (<i>quality control/QC</i>) atas Pemeriksaan Kinerja <i>Long Form Audit Report (LFAR)</i> pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai standar dan terdokumentasi</p> <p>4. Melaksanakan serah terima kertas kerja Pemeriksaan Kinerja LFAR pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari pemeriksa kepada Kepala Subauditorat (pejabat struktural pemeriksa/ PSP) setelah dilakukan <i>peer review</i> antara tim pemeriksa dan di-reviu oleh PSP sesuai persyaratan <i>quality assurance/QA</i></p> <p>Triwulan III:</p> <p>1. Melaksanakan Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional dan Tematik Lokal serta PDDT (pendahuluan)</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan <i>review</i> berjenjang dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa (PFP) atas setiap tahapan pemeriksaan (<i>quality control/QC</i>) atas Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional dan Tematik Lokal serta PDDT sesuai standar dan terdokumentasi Melaksanakan serah terima kertas kerja pemeriksaan atas Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional dan Tematik Lokal serta PDDT dari pemeriksa kepada Kepala Subauditorat (pejabat struktural pemeriksa/ PSP) setelah dilakukan <i>peer review</i> antara tim pemeriksa dan di-reviu oleh PSP sesuai persyaratan <i>quality assurance/QA</i>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Triwulan IV: 1. Melaksanakan Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional dan Tematik Lokal serta PDDT (terinci) <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan revidu berjenjang dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa (PFP) atas setiap tahapan pemeriksaan (<i>quality control/QC</i>) atas Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional dan Tematik Lokal serta PDDT sesuai standar dan terdokumentasi • Melaksanakan serah terima kertas kerja pemeriksaan atas Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional dan Tematik Lokal serta PDDT dari pemeriksa kepada Kepala Subauditorat (pejabat struktural pemeriksa/ PSP) setelah dilakukan <i>peer review</i> antara tim pemeriksa dan di-revidu oleh PSP sesuai persyaratan <i>quality assurance/QA</i>
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan I: - Triwulan II: 1. Melaksanakan revidu berjenjang dilakukan oleh PFP atas setiap tahapan pemeriksaan atas LKPD TA 2020 sesuai harapan penugasan yang tertuang dalam program pemeriksaan (P2) 2. Melaksanakan pembahasan bersama antara penanggung jawab (PJ), wakil penanggung jawab (WPJ), pengendali teknis (PT) dan tim untuk menetapkan opini 3. Melaksanakan revidu berjenjang dilakukan oleh PFP atas setiap tahapan Pemeriksaan Kinerja <i>Long Form Audit Report (LFAR)</i> pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai harapan penugasan yang tertuang dalam program pemeriksaan (P2)

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>4. Melaksanakan pembahasan bersama antara penanggung jawab (PJ), wakil penanggung jawab (WPJ), pengendali teknis (PT) dan tim untuk menetapkan simpulan</p> <p>Triwulan III:</p> <p>1. Melaksanakan review berjenjang dilakukan oleh PFP atas setiap tahapan pemeriksaan atas Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional dan Tematik Lokal serta PDDT sesuai harapan penugasan yang tertuang dalam program pemeriksaan (P2)</p> <p>Triwulan IV:</p> <p>1. Melaksanakan review berjenjang dilakukan oleh PFP atas setiap tahapan pemeriksaan atas Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional dan Tematik Lokal serta PDDT sesuai harapan penugasan yang tertuang dalam program pemeriksaan (P2)</p> <p>2. Melaksanakan pembahasan bersama antara penanggung jawab (PJ), wakil penanggung jawab (WPJ), pengendali teknis (PT) dan tim untuk menetapkan simpulan/rekomendasi</p>
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan komunikasi dengan Inspektorat dan SKPD terkait mengenai posisi TLRHP dan rencana aksi penyelesaiannya

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
								<p>Triwulan II:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) Semester I Tahun 2020 <ul style="list-style-type: none"> Memetakan status 1, 2, 3 dan 4 TLRHP, terutama apabila persentase dibawah 75% Melaksanakan pembahasan TLRHP dengan entitas Melakukan dual process TLRHP melalui aplikasi SIPTL dan secara manual sebagai <i>backup</i> data <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan komunikasi dengan Inspektorat dan SKPD terkait mengenai posisi TLRHP dan rencana aksi penyelesaiannya <p>Triwulan II:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) Semester II Tahun 2020 <ul style="list-style-type: none"> Memetakan status 1, 2, 3 dan 4 TLRHP, terutama apabila persentase dibawah 75% Melaksanakan pembahasan TLRHP dengan entitas Melakukan <i>dual process</i> TLRHP melalui aplikasi SIPTL dan secara manual sebagai <i>backup</i> data
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	-	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan kinerja atas <i>Long Form Audit Report</i> (LFAR) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. <p>Triwulan II:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeriksaan terinci kinerja atas <i>Long Form Audit Report</i> (LFAR) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. <p>Triwulan III:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeriksaan tematik nasional (pendahuluan) sesuai RKP Tahun 2021, yaitu:

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja atas Penanggulangan Stunting pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya TA 2020 • Kinerja atas Penanggulangan Stunting pada Pemerintah Kabupaten Cirebon TA 2020
								<p>Triwulan IV:</p> <p>1. Melaksanakan pemeriksaan tematik nasional (terinci) sesuai RKP Tahun 2021, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja atas Penanggulangan Stunting pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya TA 2020 • Kinerja atas Penanggulangan Stunting pada Pemerintah Kabupaten Cirebon TA 2020
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan berkomitmen dan mendukung untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan setelah berkoordinasi dan memperoleh persetujuan dari Pimpinan dan memperoleh dukungan anggaran yang memadai dari BPK Pusat <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan berkomitmen dan mendukung untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan setelah berkoordinasi dan memperoleh persetujuan dari Pimpinan dan memperoleh dukungan anggaran yang memadai dari BPK Pusat

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
								<p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan berkomitmen dan mendukung untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan setelah berkoordinasi dan memperoleh persetujuan dari Pimpinan dan memperoleh dukungan anggaran yang memadai dari BPK Pusat <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan berkomitmen dan mendukung untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan setelah berkoordinasi dan memperoleh persetujuan dari Pimpinan dan memperoleh dukungan anggaran yang memadai dari BPK Pusat
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	-	100%	Desember	<p>Triwulan I:-</p> <p>Triwulan II: -</p> <p>Triwulan III:</p> <p>1. Melaksanakan pemeriksaan tematik lokal (pendahuluan) sesuai RKP Tahun 2021, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kinerja atas Pengelolaan Persampahan pada Pemerintah Kota Bandung Kinerja atas Pengelolaan Persampahan pada Pemerintah Kota Cirebon Kinerja atas Pelayanan Publik yang mendorong Investasi Daerah pada Pemerintah Kota Cimahi TA 2020 Kinerja atas Pelayanan Publik yang mendorong Investasi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bekasi TA 2020 Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam membangun Destinasi Pariwisata pada Pemerintah Kabupaten Garut Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam membangun Destinasi

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
								<p>Pariwisata pada Pemerintah Kota Bogor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam membangun Destinasi Pariwisata pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran <p>Triwulan IV:</p> <p>1. Melaksanakan pemeriksaan tematik lokal (terinci) sesuai RKP Tahun 2021, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja atas Pengelolaan Persampahan pada Pemerintah Kota Bandung • Kinerja atas Pengelolaan Persampahan pada Pemerintah Kota Cirebon • Kinerja atas Pelayanan Publik yang mendorong Investasi Daerah pada Pemerintah Kota Cimahi TA 2020 • Kinerja atas Pelayanan Publik yang mendorong Investasi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bekasi TA 2020 • Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam membangun Destinasi Pariwisata pada Pemerintah Kabupaten Garut • Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam membangun Destinasi Pariwisata pada Pemerintah Kota Bogor • Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam membangun Destinasi Pariwisata pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai mengenai implementasi visi, misi dan nilai dasar BPK pada setiap kegiatan pengarahannya atau pembinaan oleh Pimpinan <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
								<p>mengenai implementasi visi, misi dan nilai dasar BPK pada setiap kegiatan pengarahannya atau pembinaan oleh Pimpinan</p> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai mengenai implementasi visi, misi dan nilai dasar BPK pada setiap kegiatan pengarahannya atau pembinaan oleh Pimpinan <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai mengenai implementasi visi, misi dan nilai dasar BPK pada setiap kegiatan pengarahannya atau pembinaan oleh Pimpinan
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	-	-	-	A (87,00)	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun laporan akuntabilitas kinerja satker Tahun 2020 Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja satker kepada Tortama KN V dan ditembuskan ke Ditama Revbang (Direktorat PSMK) <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan dokumen tindak lanjut hasil evaluasi Itama atas laporan sistem akuntabilitas kinerja satker Tahun 2020 <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan Evaluasi Mandiri AKIP untuk kemudian diberikan penilaian oleh Itama. <p>Triwulan IV: -</p>
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	96%	96%	96%	96%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun laporan triwulan budaya pemanfaatan teknologi informasi <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun laporan triwulan budaya pemanfaatan teknologi informasi <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun laporan triwulan budaya pemanfaatan teknologi informasi

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun laporan triwulan budaya pemanfaatan teknologi informasi
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	-	25%	50%	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menggali praktik-praktik manajemen pengetahuan melalui berbagai media sharing informasi dan keilmuan dan sebagai bahan penyusunan <i>best practice</i> satker Menyelenggarakan Diklat teknis pemeriksaan di kantor perwakilan <p>Triwulan II:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggali praktik-praktik manajemen pengetahuan melalui berbagai media sharing informasi dan keilmuan dan sebagai bahan penyusunan <i>best practice</i> satker Memilah dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun replikasi <i>best practice</i> yang akan di implementasikan di satker. Mentor CPNS (pelaksanaan Habitiasi CPNS) <p>Triwulan III:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun <i>best practice</i> satker Menyusun implementasi atas replikasi <i>best practice</i> Laporan <i>pelaksanaan</i> Mentor CPNS (pelaksanaan Habitiasi CPNS) <p>Triwulan IV:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan usulan <i>best practice</i> satker ke Ditama Revbang (Direktorat PSMK) Menyampaikan implementasi atas replikasi <i>best practice</i> yang dilaksanakan di satker ke Ditama Revbang (Direktorat PSMK)

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan survei tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan publik yang diberikan oleh BPK Perwakilan <p>Triwulan II:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan survei tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan publik yang diberikan oleh BPK Perwakilan Menyampaikan kuesioner kepuasan pemilik kepentingan atas kinerja BPK terkait hasil pemeriksaan LKPD TA 2020 kepada <i>auditee</i> <p>Triwulan III:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan survei tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan publik yang diberikan oleh BPK Perwakilan <p>Triwulan IV:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan survei tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan publik yang diberikan oleh BPK Perwakilan Menyampaikan kuesioner kepuasan pemilik kepentingan atas kinerja BPK terkait hasil pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional dan Tematik Lokal serta PDDT kepada <i>auditee</i>
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	25%	40%	75%	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun bezetting pegawai setiap bulan Menyelenggarakan diklat di BPK Perwakilan yaitu Diklat Pemeriksaan LKPD TA 2020 (SiAP LK) Menyusun monitoring jam diklat pegawai setiap bulan berdasarkan sertifikat diklat, sertifikat <i>ktf</i> dan <i>in house training</i> yang telah mendapat persetujuan badan diklat Membuat surat keputusan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
								<p>kepala perwakilan tentang penempatan pegawai</p> <p>Triwulan II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun bezetting pegawai setiap bulan 2. Menyusun monitoring jam diklat pegawai setiap bulan berdasarkan sertifikat diklat, sertifikat <i>ktf</i> dan <i>in house training</i> yang telah mendapat persetujuan badan diklat 3. Membuat surat keputusan kepala perwakilan tentang penempatan pegawai <p>Triwulan III:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun bezetting pegawai setiap bulan 2. Menyelenggarakan diklat kesekretariatan bagi pegawai non pemeriksa di perwakilan 3. Menyusun monitoring jam diklat pegawai setiap bulan berdasarkan sertifikat diklat, sertifikat <i>ktf</i> dan <i>in house training</i> yang telah mendapat persetujuan badan diklat 4. Membuat surat keputusan kepala perwakilan tentang penempatan pegawai <p>Triwulan IV:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun bezetting pegawai setiap bulan 2. Menyusun monitoring jam diklat pegawai setiap bulan berdasarkan sertifikat diklat, sertifikat <i>ktf</i> dan <i>in house training</i> yang telah mendapat persetujuan badan diklat 3. Membuat surat keputusan kepala perwakilan tentang penempatan pegawai
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan bulanan realisasi DIPA/POK satker untuk memantau penyerapan anggaran 2. Menyusun rencana penarikan dana per bulan untuk memantau konsistensi antara perencanaan dan implementasi 3. Menyusun laporan bulanan penyelesaian keluaran DIPA untuk memantau pencapaian keluaran 4. Menyusun laporan bulanan pelaksanaan kegiatan satker untuk memantau realisasi

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>dan pagu anggaran serta realisasi dan target volume keluaran</p> <p>Triwulan II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan bulanan realisasi DIPA/POK satker untuk memantau penyerapan anggaran 2. Menyusun rencana penarikan dana per bulan untuk memantau konsistensi antara perencanaan dan implementasi 3. Menyusun laporan bulanan penyelesaian keluaran DIPA untuk memantau pencapaian keluaran 4. Menyusun laporan bulanan pelaksanaan kegiatan satker untuk memantau realisasi dan pagu anggaran serta realisasi dan target volume keluaran <p>Triwulan III:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan bulanan realisasi DIPA/POK satker untuk memantau penyerapan anggaran 2. Menyusun rencana penarikan dana per bulan untuk memantau konsistensi antara perencanaan dan implementasi 3. Menyusun laporan bulanan penyelesaian keluaran DIPA untuk memantau pencapaian keluaran 4. Menyusun laporan bulanan pelaksanaan kegiatan satker untuk memantau realisasi dan pagu anggaran serta realisasi dan target volume keluaran <p>Triwulan IV:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan bulanan realisasi DIPA/POK satker untuk memantau penyerapan anggaran 2. Menyusun rencana penarikan dana per bulan untuk memantau konsistensi antara perencanaan dan implementasi 3. Menyusun laporan bulanan penyelesaian keluaran DIPA untuk memantau pencapaian keluaran 4. Menyusun laporan bulanan pelaksanaan kegiatan satker untuk memantau realisasi

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
								dan pagu anggaran serta realisasi dan target volume keluaran

Rencana kegiatan dalam Pencapaian Kinerja secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rincian Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama				Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	Keterangan
1	Pemenuhan Pemerolehan Pemeriksaan	Pengendalian Keyakinan	dan Mutu	<p>1. Melaksanakan reuiu berjenjang dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa (PFP) atas setiap tahapan pemeriksaan (<i>quality control/QC</i>) pada seluruh Pemeriksaan LKPD, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan DTT sesuai standar dan terdokumentasi;</p> <p>2. Melaksanakan serah terima kertas kerja pemeriksaan atas LKPD, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan DTT dari pemeriksa kepada Kepala Subauditorat (pejabat struktural pemeriksa/ PSP) setelah dilakukan <i>peer review</i> antara tim pemeriksa dan di-reuiu oleh PSP sesuai persyaratan <i>quality assurance/QA</i>.</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan untuk seluruh kegiatan Pemeriksaan, yaitu: Semester I:</p> <p>1. Pemeriksaan atas LKPD TA 2020 pada 28 entitas (Bulan Februari s.d. Mei 2021);</p> <p>2. Pemeriksaan DTT atas LPJ Banparpol pada 28 entitas (setelah Pemeriksaan Pendahuluan/Interim LKPD).</p> <p>Semester II:</p> <p>1. Pemeriksaan Kinerja (Kinerja Tematik dan Kinerja lokal) pada 12 entitas.</p> <p>2. Pemeriksaan DTT (Pemeriksaan Belanja) pada 8 entitas.</p>	<p>Pelaksanaan pemeriksaan menyesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020.</p> <p>Revisi RKP:</p> <p>1. Revisi Keluaran (<i>Output</i>) LHP.</p> <p>2. Revisi Objek Pemeriksaan (Semula Belanja Daerah Kota Banjar menjadi Belanja Daerah Kota Tasikmalaya).</p> <p>3. Revisi Volume Keluaran LHP Kinerja Vaksinasi.</p>
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan			<p>Triwulan I:</p> <p>1. Melaksanakan reuiu berjenjang dilakukan oleh PFP atas setiap tahapan pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2020 sesuai harapan penugasan yang tertuang dalam program pemeriksaan (P2).</p> <p>2. Melaksanakan pembahasan bersama antara penanggung jawab (PJ), wakil penanggung jawab (WPJ), pengendali teknis (PT) dan tim untuk menetapkan simpulan.</p>	

	Indikator Kinerja Utama	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	Keterangan
		<p>Triwulan II:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan revidi berjenjang dilakukan oleh PFP atas setiap tahapan pemeriksaan atas LKPD TA 2020 sesuai harapan penugasan yang tertuang dalam program pemeriksaan (P2) Melaksanakan pembahasan bersama antara penanggung jawab (PJ), wakil penanggung jawab (WPJ), pengendali teknis (PT) dan tim untuk menetapkan opini. <p>Triwulan III:</p> <p>Melaksanakan revidi berjenjang dilakukan oleh PFP atas setiap tahapan pemeriksaan atas Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional dan Tematik Lokal serta PDDT sesuai harapan penugasan yang tertuang dalam program pemeriksaan (P2).</p> <p>Triwulan IV:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan revidi berjenjang dilakukan oleh PFP atas setiap tahapan pemeriksaan atas Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional dan Tematik Lokal serta PDDT sesuai harapan penugasan yang tertuang dalam program pemeriksaan (P2) Melaksanakan pembahasan bersama antara penanggung jawab (PJ), wakil penanggung jawab (WPJ), pengendali teknis (PT) dan tim untuk menetapkan simpulan/rekomendasi. 	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> Pemantauan TLRHP pada Semester I 2021, dilaksanakan pada bulan Juli 2021 dengan Rapat PTLRHP bersama entitas di Kantor Perwakilan selama 5 hari, dilaksanakan secara online Pemantauan TLRHP pada Semester II 2021, dilaksanakan pada bulan Desember 2021 dengan Rapat PTLRHP bersama entitas di Kantor Perwakilan selama 5 hari dilaksanakan secara online oleh Tim <p>Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) Semester I dan II Tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> Memeriksa status 1, 2, 3 dan 4 TLRHP, terutama apabila persentase dibawah 75% Melaksanakan pembahasan TLRHP dengan entitas Melakukan <i>dual process</i> TLRHP melalui aplikasi SIPTL dan secara manual sebagai <i>backup data</i> 	Menyesuaikan juga dengan penginputan dalam SIPTL

Indikator Kinerja Utama		Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	Keterangan
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Melaksanakan pemeriksaan tematik nasional sesuai arahan AKN V dan RKP Tahun 2021, pada semester II Tahun 2021, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi Pariwisata 2. Pemeriksaan Kinerja Kesehatan (Vaksin) 3. DTT atas Belanja Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 	Revisi RKP pada Semester II sesuai arahan dan tematik AKN V dan AKN VI
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkomitmen dan mendukung untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan setelah berkoordinasi dan memperoleh persetujuan dari Pimpinan dan memperoleh dukungan anggaran yang memadai dari BPK Pusat; 2. Permintaan PKN dan Pemeriksaan Investigatif diarahkan ke Auditorat Utama Investigasi sesuai kewenangannya. 	
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Melaksanakan pemeriksaan tematik nasional sesuai arahan AKN V dan RKP Tahun 2021 pada semester II Tahun 2021.	
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Pelaksanaan dilakukan oleh Dit. PSMK melalui survey oleh pihak ketiga/surveyor	oleh Dit. PSMK
8	Hasil Evaluasi AKIP	Hasil penilaian/evaluasi oleh Itama atas Laporan Kinerja, diterima satker pada bulan Agustus atau September	
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai memanfaatkan update data pribadi, cuti, kehadiran, dll data kepegawaian melalui SISDM; 2. Penggunaan Presensi online melalui aplikasi kelolatugas.bpk.go.id 3. Penggunaan email bpk.go.id dan aplikasi persuratan 3.0 dan aplikasi JASMIN (mulai bulan Juli 2021) untuk pelaksanaan tugas sehari-hari; 4. Penggunaan aplikasi SMP utk menginput ST Pemeriksaan, LHP, TLRHP dan LHPT Runeg; 5. Penggunaan aplikasi SiAP LK dan SiPTL; 6. Pemanfaatan Portal Perwakilan sebagai penyimpanan arsip LHP, DEP, TLRHP dan LHPT Runeg; 7. Penggunaan aplikasi Prisam dan Prisma SKP utk validasi kinerja satker dan penilaian/penyusunan skp pegawai 8. Mengupdate berita ataupun informasi lainnya pada website perwakilan. 	

Indikator Kinerja Utama		Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	Keterangan
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun <i>best practice</i> yang sudah ada di Perwakilan sesuai format/pedoman yang telah ditetapkan dan akan disampaikan kepada Dit. PSMK sebagai usulan <i>best practice</i>, yaitu Penyelenggaraan Kegiatan Talkshow BPK Jabar Melalui TV/Radio; 2. Melaksanakan implementasi/penerapan replikasi <i>best practice</i>, yaitu "Pemanfaatan Layanan Pojok Berita Untuk Mendukung Kegiatan Pemeriksaan" BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung menjadi "Layanan Pojok Berita Media pada Website BPK Perwakilan", hal ini tidak jadi terealisasi karena sejak tahun 2019 pojok berita pada web perwakilan sudah tidak aktif.; 3. Melaksanakan Knowledge Manajemen yaitu Diklat Pemeriksaan LKPD TA 2020 dan Diseminasi kepada Pemeriksa terkait pedoman pemeriksaan. 	
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Pelaksanaan dilakukan oleh Dit. PSMK melalui survey oleh pihak ketiga/surveyor	oleh Dit. PSMK
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	<p>Untuk memenuhi JP Pemeriksa dan Pegawai Non Pemeriksa, akan dilaksanakan 2 (dua) Diklat Teknis, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat Teknis dalam rangka persiapan LKPD pada bulan Januari atau Februari 2021; 2. Diklat Kesekretariatan pada bulan Oktober atau November 2021. 	Anggaran dari Badan Diklat
13	Tingkat Kinerja Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen penganggaran dan pemantau pada setiap bulan; 2. Menyusun dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada setiap bulan; 3. Menyusun laporan keuangan tahunan; 4. Menyusun laporan kegiatan pelaksana pada setiap bulan; 5. Menyusun laporan realisasi DIPA, laporan Target Penyelesaian Keluaran, dan laporan Kemajuan Paket Pengadaan pada setiap bulan. 	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Capaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 berdasarkan hasil validasi Triwulan IV (semester II) Tahun 2021 adalah **98,55**. Skor kinerja Tahun 2021 ini menunjukkan sedikit penurunan skor sebanyak 0,11 poin jika dibandingkan skor Tahun 2020 sebesar 98,66. Penurunan skor kinerja ini terutama disebabkan adanya penurunan pada beberapa skor IKU yaitu sebagai berikut:

1. Skor IKU 7 yaitu Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK dari skor kinerja 92,2 pada tahun 2020 turun menjadi 89,0 di tahun 2021 ;
2. Skor IKU 9 yaitu Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dari skor kinerja 104,32 pada tahun 2020 turun menjadi 103,23 di tahun 2021;
3. Skor IKU 10 yaitu Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan dari skor kinerja 105 pada tahun 2020 turun menjadi 75 di tahun 2021.

Skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Skor
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat				98,55
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	86,21%	86,21
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	76,08%	101,44
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,85%	100,85
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,37%	100,37
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	101,04%	101,04
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,45	89,00
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	88,83	102,10
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	99,10%	103,23

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Skor
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	75,00%	75
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3,92	103,16
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,5%	91,18%	104,21

Dari capaian tersebut ada beberapa peningkatan skor IKU dibandingkan capaian tahun sebelumnya meskipun ada juga 3 skor IKU yang turun.

Adapun uraian lebih rinci mengenai pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Hasil *QA* dan *QC* merupakan pemenuhan *QC* Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan *QA* dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode *sampling*.

Indikator ini bertujuan untuk untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

Realisasi Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan berdasarkan hasil evaluasi Direktorat EPP, sampai dengan Triwulan IV atau Semester II adalah 86,21% dengan skor 86,21. Realisasi tersebut belum sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%. Namun jika dibandingkan dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan, capaian tersebut naik dari Tahun sebelumnya yaitu 77,68% dengan skor 77,68.

Pemenuhan *QC* dan *QA* sudah sebesar 100% untuk setiap kegiatan pemeriksaan, namun berdasarkan evaluasi Dit EPP untuk tingkat konsistensi dan tingkat akurasi atas LHP yang diterbitkan masih banyak catatan, khususnya atas LHP LKPD TA 2020. Adapun hasil hasil evaluasi Dit. EPP atas 28 LHP LKPD TA 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tingkat Konsistensi dan Tingkat Akurasi 100% : 10 LHP
- b. Tingkat Konsistensi 100% dan Tingkat Akurasi 0% : 8 LHP
- c. Tingkat Konsistensi 0% dan Tingkat Akurasi 100% : 10 LHP
- d. Tingkat Konsistensi dan Tingkat Akurasi 0% : 0 LHP

Perkembangan capaian IKU 1 atau sebelumnya IK 2.1.1 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian IKU 1 – Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	N/A	N/A	N/A	100%	100%	-	-	-	77,68 % dan 77,68	86,21% dan 86,21
2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-

Perbandingan realisasi IKU 1 atau sebelumnya IK 2.1.1 pada tahun 2020 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020-2024 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	77,68 %	86,21%
Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	-	-

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 1, pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran (revisi ke-9) sebesar Rp15.259.621.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.219.190.736,38 atau 99,74%.

2. IKU 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pencapaian IKU ini adalah 100% dengan skor 100. Capaian ini sesuai target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 100%. Jika dibandingkan Tahun 2020, realisasi IKU 2 (Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan) mencapai target 100% dengan skor 100

Perkembangan capaian IKU 2 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian IKU 2 – Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	N/A	N/A	N/A	100%	100%	-	-	-	100% dan 100	100% dan 100

Perbandingan realisasi IKU 2 pada tahun 2021 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020-2024 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	N/A	N/A	N/A	100%	100%	-	-	-	100%	100%

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 2, pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran (revisi ke-9) sebesar Rp3.796.555.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.766.770.256,00 atau 99,22%.

3. IKU 3 - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan.

Rekomendasi atas temuan-temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti merupakan salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran BPK RI dalam mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

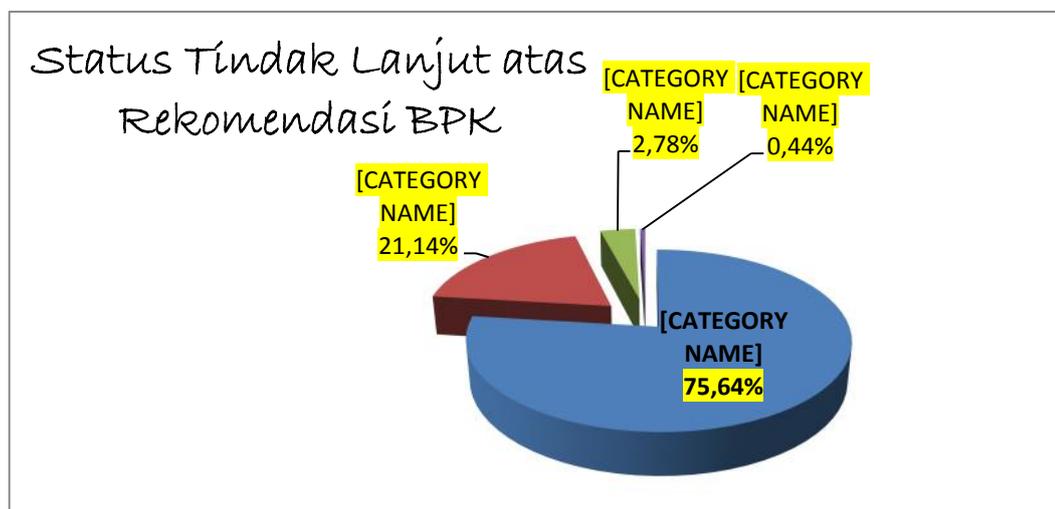
Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara/daerah.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan audite atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pengukuran atas IKU ini adalah persentase jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditindaklanjuti menurut peraturan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke entitas dari seluruh hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu selama lima tahun terakhir.

**Tabel 3.4. Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti
(sama dengan Data EPP yang dipergunakan dalam IHPS)**

No.	Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK	Jumlah	Persentase (%)
1	Sesuai dengan rekomendasi	20.411	75,64%
2	Belum sesuai dan dalam proses	5.705	21,14%
3	Belum ditindaklanjuti	750	2,78%
4	Tidak dapat ditindaklanjuti	119	0,44%
	Jumlah Rekomendasi yang disampaikan	26.985	100,00%



Gambar 3.1. Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK

Pencapaian atas IKU 3 - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk tahun 2021 mencapai 76,08% dari 75% target yang ditetapkan dengan skor 101,44.

Perkembangan capaian IKU 3 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian IKU 3 – Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	65%	75%	75%	75%	61,23% dan 94,20	68,50% dan 105	77,42% dan 103,22	75,62% dan 100,83	76,08% dan 101,44

Capaian penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, yaitu sebesar 75,62%, dan melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 75%, sehingga jika dibandingkan skor tahun 2020 mengalami kenaikan. Peningkatan capaian melebihi target tersebut disebabkan, oleh karena di tahun 2021, jajaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melakukan upaya-upaya perbaikan dan upaya persuasif kepada masing-masing Kepala Daerah, antara lain melalui kegiatan pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan pada setiap semester dengan mengundang Pemerintah Daerah dan Inspektorat Daerah di wilayah Jawa Barat ke Kantor Perwakilan serta beberapa upaya perbaikan melalui pihak Inspektorat Daerah.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Jawa Barat untuk mendorong peningkatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dengan mengadakan acara Rapat Pemantauan Tindak Lanjut di Kantor Perwakilan, dengan mengundang pihak Inspektorat Pemda, yang dilaksanakan selama setiap semester, yaitu dilaksanakan pada:

- a. Rapat PTLRHP Semester I dengan Inspektorat Pemda se-Jawa Barat yang dilakukan secara online oleh tim dengan memanfaatkan aplikasi SIPTL
- b. Rapat PTLRHP Semester II dengan Inspektorat Pemda se-Jawa Barat yang dilakukan secara online oleh tim dengan memanfaatkan aplikasi SIPTL

Selain itu, perbandingan realisasi tahun 2021 terhadap Target Kinerja lima tahunan terakhir sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020-2024 dan disesuaikan dengan target adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	65%	65%	75%	75%	75%	61,23 %	68,50 %	77,42 %	75,62 %	76,08 %

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 3 pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp190.099.000,00 dengan realisasi sebesar Rp184.580.499,00 atau 97,10%.

4. IKU 4 – Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pencapaian IKU ini adalah 100,85% dengan skor 100,85. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan dimana tahun 2020 sebesar 100,75% dengan skor 100,75.

Pada Tahun 2021 di Semester II, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ikut terlibat dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, yaitu 3 (Tiga) Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam membangun destinasi pariwisata, 1 (satu) Kinerja atas Pendidikan Vokasi, 3 (Tiga) Kinerja Kesehatan Vaksin dan 1 (satu) Kepatuhan atas Belanja Dana Desa untuk Penanganan COVID-19:

- a. Pemeriksaan atas Kinerja Upaya Pemerintah Daerah dalam membangun destinasi pariwisata pada Pemerintah Kota Bogor TA 2020 (Lokal-Pariwisata).
- b. Pemeriksaan atas Kinerja Upaya Pemerintah Daerah dalam membangun destinasi pariwisata pada Pemerintah Kab Garut TA 2020 (Lokal-Pariwisata)
- c. Pemeriksaan Kinerja atas Pariwisata pada Pemerintah Kabupaten Bandung TA 2020

- d. Pemeriksaan Kinerja atas Pendidikan Vokasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- e. Pemeriksaan Kinerja Kesehatan (Vaksin) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- f. Pemeriksaan Kinerja Kesehatan (Vaksin) pada Pemerintah Kota Bandung
- g. Pemeriksaan Kinerja Kesehatan (Vaksin) pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- h. Pemeriksaan DTT atas Belanja Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 pada Kabupaten Majalengka

Perkembangan capaian IKU 4 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian IKU 4 - Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	N/A	N/A	N/A	100 %	100%	-	-	-	100.75 % dan 100.75	100.85% dan 100.85

Perbandingan realisasi IKU 4 pada tahun 2021 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020-2024 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	N/A	N/A	N/A	100%	100%	-	-	-	100.75 %	100,85 %

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 4, pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran (revisi ke-9) sebesar Rp1.171.092.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.164.422.150,00 atau 99,43%.

5. IKU 5 – Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan.

IKU ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Untuk tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat hanya menjalankan fungsi koordinasi dengan pihak atau pemangku kepentingan yang meminta pemenuhan pemeriksaan khususnya permintaan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) atau permintaan Pemeriksaan Investigasi (PI). Karena untuk semua permintaan PKN dan permintaan PI, sejak Tahun 2018 sudah dialihkan kepada satker Auditorat Utama Investigasi (AUI) di Kantor Pusat. Sehingga fungsi perwakilan hanya berkoordinasi dengan pihak pemohon dhi. IPH dengan pihak AUI. Untuk output LHP PKN maupun LHP PI merupakan output dari AUI. Selama Tahun 2021 terdapat 2 (dua) Pemeriksaan yaitu :

a. Pemeriksaan Investigasi

b. LK International Maritime Organization (IMO), World Maritime University (WMU), dan International Maritime Law Institute (IMLI) TA 2020

Capaian IKU 5 pada tahun 2021 adalah 100,37% dengan skor 100,37, jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan dimana tahun sebelumnya 100% dengan skor 100,37. Hal tersebut disebabkan dengan adanya partisipasi dalam pemeriksaan Investigasi dan LK International Maritime Organization (IMO), World Maritime University (WMU), dan International Maritime Law Institute (IMLI).

Perkembangan capaian IKU 5 atau sebelumnya IKU 1.3 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian IKU 5 - Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100% dan 100	100% dan 100	100% dan 100	100% dan 100	100,37 % dan 100,37

Perbandingan realisasi IKU 5 pada tahun 2021 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020-2024 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,37 %

Untuk melaksanakan kegiatan koordinasi terkait IKU 5, pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran (revisi ke-9) sebesar Rp167.028.000,00 dengan realisasi sebesar Rp165.464.744,00 atau 99,06%.

6. IKU 6 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pencapaian IKU ini adalah 101,04% dengan skor 100,04. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 100%. jika diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam 100% dengan skor 100.

Pada Tahun 2021 di Semester II, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ikut terlibat dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, yaitu 3 (tiga) Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Kemandirian Fiskal dan 2 (dua) Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Pelayanan Perizinan dalam Mendorong Investasi Daerah, sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Kemandirian Fiskal pada Pemerintah Kabupaten purwakarta;
- b. Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Kemandirian Fiskal pada Pemerintah Kab Pangandaran
- c. Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Kemandirian Fiskal Kabupaten Tasikmalaya TA 2020
- d. Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Pelayanan Perizinan dalam Mendorong Investasi Daerah pada Kabupaten Sumedang TA 2020
- e. Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Pelayanan Perizinan dalam Mendorong Investasi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor

Perkembangan capaian IKU 6 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian IKU 6 – Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	N/A	N/A	N/A	100 %	101,04%	-	-	-	100% dan 100	101,04% dan 100,04

Perbandingan realisasi IKU 6 pada tahun 2021 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020-2024 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	N/A	N/A	N/A	100%	100%	-	-	-	100%	101,04 %

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 6, pada Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran (revisi ke-9) sebesar Rp943.310.000,00 dengan realisasi sebesar Rp931.012.606,00 atau 98,28%.

7. IKU 7 – Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Pengukuran dinilai dalam bentuk indeks yang dilaksanakan oleh Dit. PSMK melalui penyebaran kuesioner secara online kepada pegawai di BPK Perwakilan dan pelaksanaannya dilakukan pihak surveyor independen yang ditunjuk dan ditugaskan oleh BPK.

Capaian IKU ini dalam Tahun 2021 adalah 4,45 dengan skor 89,00. Capaian ini sedikit menurun jika dibandingkan capaian pada Tahun 2020 sebesar 4,61, dengan skor 92,20. Namun demikian, capaian Tahun 2021 ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu sebesar 5,00.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berkomitmen melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan pemahaman para pegawai atas visi, misi dan nilai dasar BPK. Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi tentang visi, misi dan nilai dasar BPK melalui pengarahannya Kepala Perwakilan dan Pimpinan yang datang dalam rangka kunjungan kerja dan Pengarahannya Kepala Perwakilan kepada Para Pemeriksa sebelum berangkat pemeriksaan lapangan. Selain itu juga dengan TV Informasi yang berada di lobi dan di Kafe Mandiri Kantor Perwakilan.

Perkembangan capaian IKU 7 atau sebelumnya IK 3.1.1 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian IKU 7 – Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	N/A	N/A	5,00	5,00	5,00	N/A	4,47 dan 89,4	4,78 dan 95,60	4,61 dan 92,20	4,45 dan 89,00

Perbandingan realisasi tahun 2021 terhadap Target Kinerja lima tahunan belum tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2010-2024, IKU ini baru ada di tahun 2018 dalam Perjanjian Kinerja pada setiap Perwakilan. Namun demikian apabila diperbandingkan untuk kurun waktu lima tahunan, maka direncanakan target sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	N/A	N/A	5,00	5,00	5,00	N/A	4,47	4,78	4,61	4,45

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 7, pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran kegiatan pembinaan oleh Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPK sebesar Rp161.892.000,00 dengan realisasi sebesar Rp161.844.193,00 atau 99,97%.

8. IKU 8 - Hasil Evaluasi AKIP

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Pelaksana BPK, maka Perwakilan Provinsi Jawa Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) setiap tahunnya. Selain itu, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat, LAK ini akan dievaluasi oleh Inspektorat Utama secara periodik.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama No. 400/ND/XI/09/2021, tanggal 21 September 2021 perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dinyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat memperoleh nilai sebesar 88,30 atau dengan kategori "A" (Memuaskan) dengan skor 102,10. Capaian ini walaupun melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 87,00 atau di kategori "A", namun jika diperbandingkan dengan capaian Tahun 2020 mengalami sedikit penurunan. Tahun 2020 memperoleh nilai sebesar 89,09 atau dengan kategori "A" (Memuaskan) dengan skor 103,59.

Perkembangan capaian IKU 8 atau sebelumnya IK 3.2.1 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian IKU 8 – Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
8	Hasil Evaluasi AKIP	A	A	AA	A	A	A dan 100	BB dan 88,89	AA dan 100	A dan 103,59	A dan 102,10

Perbandingan realisasi IKU 8 pada tahun 2021 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2029-2024 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Hasil Evaluasi AKIP	A	A	A	A	A	A	BB	AA	A	A

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 8, pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp17.076.000,00 dengan realisasi sebesar Rp17.013.600,00 atau 99,63%.

9. IKU-9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SIPTL, *Big Data Analytic*). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

IKU ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pencapaian IKU ini dalam tahun 2021 adalah 99,10% dengan skor 103,23. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 96%. Capaian ini tetap tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan bila dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar 99,10% dengan skor 104,32.

Perkembangan capaian IKU 9 atau sebelumnya IK 3.2.2 dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian IKU 9 - Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	80%	95%	95%	96%	75,69 % dan 94,61	82,68 % dan 103,36	98,92 % dan 104,13	99,10 % dan 104,32	99,10 % dan 103,23

Target IKU 9 pada tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian masih ada beberapa hal yang kurang yaitu pemanfaatan portal e-Audit belum maksimal walaupun sudah digunakan oleh pemeriksa, hal tersebut dikarenakan pemeriksa hanya akan mengakses portal e-Audit semata-mata untuk menguji manifest dari maskapai penerbangan tertentu. Jenis pengujian ini biasanya hanya dilakukan pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan ataupun Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Selain itu, pemanfaatan aplikasi SMP, SiAP dan SIPTL sudah mencapai 100% dimanfaatkan dalam rangka pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Demikian pula pemanfaatan portal, e-mail, e-drive dan SISDM sudah mulai diperhatikan dan banyak dipergunakan oleh Pegawai, terutama pemanfaatan aplikasi SISDM untuk melihat data kehadiran pegawai.

Rincian tingkat pemanfaatan TI Tahun 2020 di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 3.12 Tingkat Pemanfaatan TI Tahun 2021

Layanan Dasar			Layanan Aplikasi Umum	Layanan Aplikasi Pemeriksaan				Aplikasi Manajemen Pengetahuan (5%)
e-mail (15%)	e-drive (10%)	Portal (5%)	SISDM (25%)	SMP (15%)	SiAP (10%)	SiPTL (15%)	Big Data Analytic	
100,00%	100,00%	100,00%	96,40%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%
100,00%			96,40%	100,00%				100,00%

Perbandingan realisasi IKU 9 atau sebelumnya IK 3.2.2 pada tahun 2020 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020-2024 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	80%	95%	95%	95%	79,69 %	82,68 %	98,92 %	99,10 %	99,10 %

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 9, pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp23.676.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26.150.071,00 atau 110,45%.

10. IKU-10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reuiu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer

pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No. 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

IKU ini merupakan IKU baru yang menggabungkan antara IKU *Best Practice* yang disusun, dan IKU Penerapan *Best Practice* serta ditambah dengan Aktivitas Manajemen Pengetahuan yang ketiga kegiatan tersebut dilakukan oleh Satker dalam kurun waktu satu tahun.

Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan penerapan manajemen pengetahuan, dengan melakukan replikasi atas salah satu *best practice*, mengusulkan satu *best practice* dan melakukan aktivitas manajemen pengetahuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Nota Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat No. 322/ND/XVIII.BDG/10/2021 18 Oktober 2021, yaitu “Penyelenggaraan Media Workshop BPK Jabar”. *Best practice* ini diterapkan untuk memaksimalkan fungsi Subbagian Humas dan TU sehingga pesan yang disampaikan oleh BPK Jabar kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik dapat tersampaikan dengan baik.
- b. Nota Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat No. 404/ND/XVIII.BDG/12/2021 31 Desember 2021, menyampaikan 4 (empat) kegiatan atau aktivitas manajemen pengetahuan yang dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2021, yaitu:
 - 1) Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual pada tanggal 19 s.d. 21 Januari 2021 di Kantor Perwakilan dengan narasumber Oktono Batubara, Ratnaris Hermawati, Dicky Arnes, Hengki, Cut Putri Nehrisyah dan Muhammad Rizkarmen.
 - 2) Workshop Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara secara online pada tanggal 7 Juni 2021 dengan narasumber Supriyonohadi dari Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah.
 - 3) Sosialisasi Peraturan Sekjen BPK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa dengan narasumber Emmy Mutiarini, Firta Sari Moenir, Tjatur Laksmi Indriani.
 - 4) Knowledge Transfer Forum (KTF)
 - a. Pemaparan Perumusan Kesimpulan dalam Pemeriksaan Kinerja menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan narasumber Roby Kuswanto.
 - b. Pemaparan Teknik Mendeteksi Fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa, dengan narasumber Andi Sopyan.
 - c. Pemaparan Teknik Pemeriksaan Cek Fisik Konstruksi Gedung dan Jalan dengan narasumber Martinus Azaryah.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Direktorat PSMK No. 853/ND/XII.1/11/2021 tanggal 18 November 2021, Penyampaian Hasil Penilaian Usulan Best Practice, dapat dipertimbangkan sebagai promising Practice. Usulan tersebut diakui sebagai capaian Indikator Kinerja “Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan” Tahun 2021.

Pencapaian IKU baru ini di Tahun 2021, adalah 75% dengan skor 75. Capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 100%. IKU ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun sebelumnya capaian IKU tersebut adalah 105 dengan skor 105, hal tersebut tidak adanya replika *Best practice* (Penerapan *Best Practice*) yang diusulkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Perkembangan capaian IKU 10 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian IKU 10 - Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	N/A	N/A	N/A	100 %	100%	-	-	-	125% dan 105	75% dan 75

Perbandingan realisasi IKU 10 pada tahun 2021 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020-2024 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	N/A	N/A	N/A	100%	100%	-	-	-	125%	75%

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 10, pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran (revisi ke-9) sebesar Rp58.235.000,00 dengan realisasi sebesar Rp52.372.765,00 atau 89,93%.

11. IKU-11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. IKU ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Pencapaian IKU ini adalah 3,92 (memuaskan) dengan skor 103,16. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 3,80 (memuaskan). Apabila dibandingkan

dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan dimana tahun sebelumnya adalah 3,59 (memuaskan) dengan skor 94,47.

Pelaksanaan penilaian Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi dilakukan oleh Dit. PSMK melalui survei oleh pihak ketiga/surveyor. Oleh karenanya hasil survei tersebut merupakan penilaian yang independen. Berdasarkan hasil survei tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat perlu lebih aktif untuk meningkatkan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Jawa Barat baik melalui saluran Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Perwakilan, Kehumasan melalui website maupun melalui WAG dengan humas pemda maupun wartawan media massa.

Perkembangan capaian IKU 11 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian IKU 11 - Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	N/A	N/A	N/A	3,80	3,80	-	-	-	3,59 dan 94,47	3,92 dan 103,16

Perbandingan realisasi IKU 11 pada tahun 2021 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2020-2024 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	N/A	N/A	N/A	100%	100%	-	-	-	94,47%	103,16 %

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 11, pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran (revisi ke-9) sebesar Rp151.557.000,00 dengan realisasi sebesar Rp151.264.002,00 atau 99,81%.

12. IKU 12 - Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut :

- Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
- Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun

- c. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.

IKU ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tuisi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Untuk tahun 2021, realisasi IKU 12 adalah sebesar 100% dengan skor kinerja 100. Nilai IKU ini mencapai target yang diharapkan sebesar 100%, walaupun sudah lebih baik dari capaian tahun 2020 sebesar 97,77% dan sudah mencapai target yang diharapkan, tentunya masih terdapat beberapa catatan penting diantaranya keterbatasan jumlah pemeriksa di Perwakilan yang tidak sebanding dengan tingginya frekuensi pemeriksaan. Hal tersebut menyebabkan jadwal diklat berbarengan dengan tugas pemeriksaan yang harus segera diselesaikan serta beberapa keadaan yang terjadi Tahun 2021 khususnya kondisi masih belum pulih dari pandemi Covid-19.

Sampai dengan akhir tahun 2021, target 100% untuk pegawai yang memenuhi jam diklat tercapai, dari 132 orang pemeriksa, semua pemeriksa yang memenuhi target 40 JP. Untuk itu, kedepannya akan pertahankan dan tentunya akan berupaya lebih baik terkait dengan pelaksanaan diklat yang disesuaikan dengan waktu pemeriksaan.

Perkembangan capaian IKU 12 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian IKU 12 - Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	88,52 % dan 88,52	89,26 % dan 89,26	92,80 % dan 92,80	97,77 % dan 97,77	100% Dan 100
		90%	100%	100%	100%	100%	87,27 % dan 96,97	100% dan 100	95% dan 95		

Perbandingan realisasi IKU 12 pada tahun 2020 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%		88,52%	89,26%	92,80%	97,77%	100%
	90%	100%	100%			87,27%	100%	95%		

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 12, pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran (revisi ke-9) sebesar Rp75.665.000,00 dengan realisasi sebesar Rp73.076.518,00 atau 96,58%.

13. IKU 13 – Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu: a. Penyerapan anggaran; b. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi; c. Pencapaian keluaran; dan d. Efisiensi.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pencapaian IKU ini pada Tahun 2021 mencapai 91,18% dengan skor 104,21 atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 87,5%. Adapun capaian Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran tersebut berdasarkan Hasil Penilaian dari Biro Keuangan, sebagai berikut:

Penilaian Biro Keuangan atas IKU 13 – Tingkat Kinerja Anggaran		
Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA)	Nilai Aspek Implementasi
86,35%	98,43%	91,18%

Jika dibandingkan untuk capaian nilai Aspek Kinerja Anggaran selama kurun waktu lima tahun, sebagai berikut:

Perbandingan Nilai Aspek Implementasi Anggaran					
Tahun	Penyerapan Anggaran	Pencapaian Keluaran	Konsistensi	Efisiensi	Nilai Implementasi
2021	86,35%		98,43%		91,18%
2020	87,82%		88,83%		88,22%
2019	95,10%	100%	99,58%	62,24%	88,65%
2018	95,43%	99,49%	70,20%	61%	82,76%
2017	91,31%	99,39%	86,68%	64,81%	86,40%

Perkembangan capaian IKU 13 dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian IKU 13 – Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

IKU	Uraian	Target IKU					Realisasi dan Skor Capaian IKU				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
13	Tingkat Kinerja Anggaran	82%	85%	80%	87%	87,5 %	86,40% dan 105	82,76% dan 97,36	88,65% dan 105	88,22% dan 101,40	91,18% dan 104,21

Berdasarkan Tabel 3.16 di atas, capaian IKU 13 tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Peningkatan ini terjadi disebabkan tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2021 mencapai 99,21% atau naik dibandingkan tahun 2020. Naiknya capaian atas IKU 13 juga disebabkan naiknya Tingkat Konsistensi dan Efisiensi (EPA) yaitu sebesar 98,43% dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebesar 88,83% .

Adapun Tingkat Penyerapan Anggaran berdasarkan jenis layanan, sebagai berikut:

Tabel 3.17 Tingkat Penyerapan Anggaran berdasarkan Layanan

Tahun	Layanan	Revisi ke-9 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	18.345.794.000,00	18.274.327.944,00	99,61
	Sekretariat Perwakilan	1.519.171.000,00	1.517.141.703,00	99,83
	Sarana dan Prasarana Internal	1.092.027.000,00	1.092.020.700,00	100,00
	Perkantoran	18.108.702.000,00	17.995.918.119,00	99,38
	Total DIPA 2020	39.066.240.000,00	38.879.408.466,00	99,38

Sedangkan perbandingan realisasi IKU 13 pada tahun 2020 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2010-2024 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun Renstra					Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Kinerja Anggaran	82%	85%	85%	87%	87,5 %	86,40%	82,76%	88,65%	88,22%	91,18%

Walaupun realisasi atas target IKU 13 ini telah melebihi target yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat tetap akan melakukan upaya yang lebih maksimal untuk mencapai target ditahun yang akan datang, Upaya perbaikan yang dilakukan pada tahun 2021, antara lain:

- Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran antar unit kerja;
- Menyusun RPD secara lebih cermat dengan mempertimbangkan kepastian pelaksanaan rencana kegiatannya;
- Meminta unit kerja untuk membuat rencana kegiatan dan anggarannya, sehingga dapat dipantau dan dievaluasi jika ada yang belum terlaksana; dan
- Melakukan revisi anggaran secara lebih cermat.

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 13 pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp260.928.000,00 dengan realisasi sebesar Rp260.918.000,00 atau 100%.

B. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran berdasarkan Laporan Realisasi DIPA

Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan dalam mencapai kinerja tahun 2021 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Laporan Realisasi DIPA Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program/Kegiatan/Keluaran/SubKeluaran	Output Keluaran (volume)			Anggaran (Rp)		%
	Target	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	
1 LHP BPK Perwakilan Jawa Barat	354	354	LHP	15,805,863,000.00	15,765,332,636.38	99.74%
a. LHP Keuangan	26	26	LHP	5,040,378,000.00	5,031,500,345.38	99.82%
b. LHP Kinerja	11	11	LHP	2,138,450,000.00	2,115,450,256.00	98.92%
c. LHP DTT	8	8	LHP	1,658,105,000.00	1,651,320,000.00	99.59%
d. LHP DTT Banpol	261	261	LHP	546,242,000.00	546,141,900.00	99.98%
e. LHP Pendahuluan/Interim	48	48	LHP	6,422,688,000.00	6,420,920,135.00	99.97%
2 LHP KAP untuk dan atas nama BPK	2	2	LHP	1,109,080,000.00	1,105,121,420.00	99.64%
3 Laporan Pemantauan BPK	112	112	LHP	674,057,000.00	656,681,683.00	97.42%
a. Kerugian Daerah	56	56	LHP	483,958,000.00	472,101,184.00	97.55%
b. TLRHP	56	56	LHP	190,099,000.00	184,580,499.00	97.10%
4 Rumusan Bahan Pendapat	1	1	Rumusan Bahan	950,000.00	908,000.00	95.58%
5 Layanan Administrasi Pemeriksaan	12	12	Laporan	709,870,000.00	700,408,080.00	98.67%
6 Sumbangan IHPS	2	2	Sumbangan IHPS	37,570,000.00	37,524,125.00	99.88%
7 Laporan Profil Entitas	28	28	Laporan	8,404,000.00	8,352,000.00	99.38%
8 Layanan Sekretariat Perwakilan	20	20	Laporan	1,519,717,000.00	1,517,141,703.00	99.83%
9 Layanan Sarana dan Prasarana Interna	1	1	Laporan	1,092,027,000.00	1,092,020,700.00	100.00%
10 Layanan Perkantoran	12	12	Layanan	18,108,702,000.00	17,995,918,119.00	99.38%

Dari alokasi anggaran tersebut, pada revisi ke-9 maka BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mampu merealisasikannya sebesar Rp38.879.409,00 atau 99,52% dari anggaran. Persentase penyerapan anggaran ini lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penyerapan tahun 2020, yaitu sebesar 95,53%

2. Realisasi Anggaran berdasarkan Realisasi Kinerja

Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan dalam mencapai kinerja tahun 2020 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Laporan Kinerja Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	86,21%	15.259.621.000,00	15.219.190.736,38	
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	3.796.555.000,00	3.766.770.256,00	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	76,08%	190.099.000,00	184.580.499,00	
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,85%	1.171.092.000,00	1.164.422.150,00	Pemeriksaan Pendahuluan dan Terinci Kinerja dan PDTT Penanganan Pandemi Covid-19
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,37%	167.028.000,00	165.464.744,00	Layanan Bidang Hukum
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	101,04%	943.310.000,00	931.012.606,00	Pemeriksaan Pendahuluan dan Terinci Kinerja dan PDTT
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,45	161.892.000,00	161.844.193,00	Pembinaan yang dilaksanakan oleh Pimpinan
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	88,83	17.076.000,00	17.013.600,00	Layanan Bidang Keuangan

Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	99,10%	23.676.000,00	26.150.071,00	Layanan bidang Umum dan TI
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	75,00%	58.235.000,00	52.372.765,00	Layanan bidang Kehumasan
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3,92	151.557.000,00	151.264.002,00	Layanan bidang Kehumasan
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	75.665.000,00	73.076.518,00	Anggaran Layanan SDM, yaitu Pengembangan Kompetensi dan penilaian Kinerja Pegawai, sedangkan anggaran pelaksanaan diklat berasal dari Badan Diklat
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,5%	91,18%	260.928.000,00	260.918.000,00	Layanan Bidang Keuangan

Dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (d.h.i. Auditor Utama Keuangan Negara V) pada bulan Desember 2020, selain Indikator Kinerja Utama dicantumkan juga didalamnya yaitu Indikator Rincian Output dan Target Tahun 2021 yang biasa disebut dengan IKK (Indikator Kinerja Keluaran). Dibawah ini merupakan Indikator Rincian Output (IKK) Tahun 2021 pada Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.20 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Rincian Output (IKK) Tahun 2021

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran				
Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%	100%	Triwulan I: 1. Menyusun Tim Pemeriksa dan Program Pemeriksaan (P2) atas Pemeriksaan LKPD TA 2020 (terinci) 2. Menerima LK TA 2020 (<i>unaudited</i>) dari Pemda

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>Triwulan II:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2020 Menyusun LHP atas LKPD TA 2020 (<i>audited</i>) Menyampaikan /menyerahkan LHP atas LKPD TA 2020 (<i>audited</i>) kepada DPRD dan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota <p>Triwulan III:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan LHP atas LKPD TA 2020 (<i>audited</i>) kepada DPRD dan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota Menyampaikan LHP atas LKPD TA 2020 (<i>audited</i>) kepada Ditama Revbang sebagai bahan IHPS <p>Triwulan IV:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun Tim Pemeriksa dan Program Pemeriksaan (P2) Kinerja Tematik Nasional dan Tematik Lokal serta Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) (terinci) Melaksanakan Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional dan Tematik Lokal serta Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) (terinci) Menyusun LHP Kinerja Tematik Nasional dan Tematik Lokal serta Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) (terinci) Menyampaikan /menyerahkan LHP Kinerja Tematik Nasional dan Tematik Lokal serta Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) (terinci) kepada DPRD dan Pemda
LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	100%	100%	<p>Triwulan I:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun Tim Pemeriksa dan Program Pemeriksaan (P2) atas Pemeriksaan LKPD TA 2020 (terinci) Menerima LK TA 2020 (<i>unaudited</i>) dari Pemda <p>Triwulan II:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2020 Menyusun LHP atas LKPD TA 2020 (<i>audited</i>) Menyampaikan /menyerahkan LHP atas LKPD TA 2020 (<i>audited</i>) kepada DPRD dan Pemda Kabupaten/Kota <p>Triwulan III:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan LHP atas LKPD TA 2020 (<i>audited</i>) kepada DPRD dan Pemda Kabupaten/Kota Menyampaikan LHP atas LKPD TA 2020 (<i>audited</i>) kepada Ditama Revbang sebagai bahan IHPS <p>Triwulan IV: -</p>
LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol	100%	100%	<p>Triwulan I:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun Tim Pemeriksa dan Program Pemeriksaan (P2) atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2020</p> <p>2. Melaksanakan Pemeriksaan atas Laporan Pertanggung-jawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2020</p> <p>3. Menyusun LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2020</p> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan LHP atas Laporan Pertanggung-jawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2020 kepada Kesbangpol dan Ketua Partai Politik <p>Triwulan III: -</p> <p>Triwulan IV: -</p>
Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%	100%	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan informasi dan data sebagai bahan penyusunan perumusan bahan pendapat perwakilan <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan informasi dan data sebagai bahan penyusunan perumusan bahan pendapat perwakilan <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun perumusan bahan pendapat perwakilan <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan usulan bahan pendapat perwakilan kepada Ditama Revbang
Sumbangan IHPS	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%	100%	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun sumbangan IHPS <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meng-upload/input data hasil pemeriksaan pada aplikasi SMP <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun sumbangan IHPS <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meng-upload/input data hasil pemeriksaan pada aplikasi SMP
Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%	100%	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan data profil entitas <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun profil entitas <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan data profil entitas <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun profil entitas

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Tingkat Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	<p>Triwulan I: -</p> <p>Triwulan II:</p> <p>1. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) Semester I Tahun 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembahasan TLRHP dengan entitas Meng-input/upload hasil pemantauan TLRHP ke dalam aplikasi SIPTL Menyusun laporan pemantauan TLRHP Semester I Tahun 2021 Menyampaikan laporan pemantauan TLRHP Semester I Tahun 2021 kepada Ditama Revbang (Direktorat EPP) <p>Triwulan III: -</p> <p>Triwulan IV:</p> <p>1. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) Semester II Tahun 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembahasan TLRHP dengan entitas Meng-input/upload hasil pemantauan TLRHP ke dalam aplikasi SIPTL Menyusun laporan pemantauan TLRHP Semester II Tahun 2021 Menyampaikan laporan pemantauan TLRHP Semester II Tahun 2021 kepada Ditama Revbang (Direktorat EPP)
Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Ganti Kerugian Negara atau Daerah	100%	100%	<p>Triwulan I: -</p> <p>Triwulan II:</p> <p>1. Melaksanakan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Semester I Tahun 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembahasan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dengan entitas Meng-input/upload hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah ke dalam aplikasi SIKAD Menyusun laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Semester I Tahun 2021 Menyampaikan laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Semester I Tahun 2021 kepada Ditama Revbang (Direktorat EPP) <p>Triwulan III: -</p> <p>Triwulan IV:</p> <p>1. Melaksanakan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Semester II Tahun 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembahasan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dengan entitas Meng-input/upload hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah ke dalam aplikasi SIKAD Menyusun laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Semester II Tahun

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				2020 <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Semester II Tahun 2020 kepada Ditama Revbang (Direktorat EPP)
Laporan Interim/Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	100%	100%	Triwulan I: 1. Menyusun Tim Pemeriksa dan Program Pemeriksaan Interim atas LKPD TA 2020 dan Kinerja atas L FAR 2. Melaksanakan Pemeriksaan Interim atas LKPD TA 2020 3. Menyusun LHP Interim atas LKPD TA 2020 4. Menyusun LHP Interim L FAR Triwulan II:- Triwulan III: 1. Menyusun Tim Pemeriksa dan Program Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional dan Tematik Lokal serta PD TT (pendahuluan) 2. Melaksanakan Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional dan Tematik Lokal serta PD TT (pendahuluan) 3. Menyusun LHP Kinerja Tematik Nasional dan Tematik Lokal serta PD TT (pendahuluan) Triwulan IV: -
Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	100%	100%	Triwulan I: Menyusun dan menyampaikan Laporan Manajemen Pemeriksaan pada setiap bulan dan menyampaikan kepada Ditama Revbang dan Biro Keuangan. Triwulan II: Menyusun dan menyampaikan Laporan Manajemen Pemeriksaan pada setiap bulan dan menyampaikan kepada Ditama Revbang dan Biro Keuangan. Triwulan III: Menyusun dan menyampaikan Laporan Manajemen Pemeriksaan pada setiap bulan dan menyampaikan kepada Ditama Revbang dan Biro Keuangan. Triwulan IV: Menyusun dan menyampaikan Laporan Manajemen Pemeriksaan pada setiap bulan dan menyampaikan kepada Ditama Revbang dan Biro Keuangan.
Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Pemeriksaan	100%	94%	Triwulan I: 1. Menginput dan validasi dokumen pendukung pengukuran kinerja Tw IV Tahun 2020 (Semester II Tahun 2020) 2. Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahun sebelumnya (Tahun 2020) kepada Tortama KN V. 3. Menyusun Laporan Bulanan dan menyampaikan kepada Ditama Revbang dan Biro Keuangan. 4. Menyusun Laporan Penerapan Manajemen Resiko Semester II Tahun 2020 dan menyampaikan kepada Ditama Revbang

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>Triwulan II:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menginput dan validasi dokumen pendukung pengukuran kinerja triwulan I Tahun 2021 Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tw I Tahun 2021 kepada Tortama KN V. Menyusun Laporan Bulanan dan menyampaikan kepada Ditama Revbang dan Biro Keuangan. Menyusun Profil Resiko Perwakilan Tahun 2021 <p>Triwulan III:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menginput dan validasi dokumen pendukung pengukuran kinerja triwulan II Tahun 2021 Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tw II Tahun 2021 kepada Tortama KN V. Menyusun Laporan Bulanan dan menyampaikan kepada Ditama Revbang dan Biro Keuangan. Menyusun Laporan Penerapan Manajemen Resiko semester I Tahun 2021. <p>Triwulan IV:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menginput dan validasi dokumen pendukung pengukuran kinerja triwulan III Tahun 2021 Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tw III Tahun 2021 kepada Tortama KN V. Menyusun Laporan Bulanan dan menyampaikan kepada Ditama Revbang dan Biro Keuangan. Validasi dan menyusun Laporan Kinerja Tw IV Tahun 2021 akan dilaksanakan pada bulan berikutnya di Tahun 2022.
Layanan Sarana Internal	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 Paket	1 Paket	Triwulan I: -
				Triwulan II: Melaksanakan survei harga pasar
				Triwulan III: melaksanakan survei harga pasar
	Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Paket	1 Paket	Triwulan IV: Melaksanakan pengadaan kendaraan dinas roda 2
				Triwulan I: Melaksanakan survei harga pasar
				Triwulan II: Mengajukan revisi uraian pengadaan
				Triwulan III: Melaksanakan survei harga pasar
	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket	1 Paket	Triwulan IV: Melaksanakan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
				Triwulan I: Melaksanakan survei harga pasar
Triwulan II: Mengajukan revisi uraian pengadaan				
Triwulan III: Melaksanakan survei harga pasar				
Layanan Prasarana Internal	Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Paket	1 Paket	Triwulan IV: Melaksanakan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
				Triwulan I: 1. Menyusun dokumen kontrak
				Triwulan II: Melaksanakan survei harga pasar
				Triwulan III: Melaksanakan survei harga pasar

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>penunjukan rekanan Melaksanakan renovasi Gedung dan Bangunan (Gedung Kantor dan Rumah Jabatan)</p> <p>Triwulan II: Melaksanakan renovasi Gedung dan Bangunan (Gedung Kantor dan Rumah Jabatan)</p> <p>Triwulan III: Melaksanakan renovasi Gedung dan Bangunan (Gedung Kantor dan Rumah Jabatan)</p> <p>Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan renovasi Gedung dan Bangunan (Gedung Kantor dan Rumah Jabatan) </p>
Layanan Perkantoran	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%	99,07%	<p>Triwulan I: Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan PNS setiap bulan</p> <p>Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan PNS setiap bulan </p> <p>Triwulan III: Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan PNS setiap bulan</p> <p>Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan PNS setiap bulan </p>
	Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%	99,99%	<p>Triwulan I: <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan layanan perkantoran bidang kehumasan dan TU Melaksanakan layanan perkantoran bidang sumber daya manusia Melaksanakan layanan perkantoran bidang keuangan Melaksanakan layanan perkantoran bidang umum dan TI </p> <p>Triwulan II: <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan layanan perkantoran bidang kehumasan dan TU Melaksanakan layanan perkantoran bidang sumber daya manusia Melaksanakan layanan perkantoran bidang keuangan Melaksanakan layanan perkantoran bidang umum dan TI </p> <p>Triwulan III: <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan layanan perkantoran bidang kehumasan dan TU Melaksanakan layanan perkantoran bidang sumber daya manusia Melaksanakan layanan perkantoran bidang keuangan <p>Melaksanakan layanan perkantoran bidang umum dan TI</p> <p>Triwulan IV: <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan layanan perkantoran bidang kehumasan dan TU Melaksanakan layanan perkantoran bidang sumber daya manusia </p> </p>

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				3. Melaksanakan layanan perkantoran bidang keuangan 4. Melaksanakan layanan perkantoran bidang umum dan TI

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja yang dicapai oleh Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang memuat baik keberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan maupun belum tercapainya beberapa target kinerja yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai visi BPK, yaitu menjadi lembaga pemeriksa keuangan Negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan.

Pencapaian skor kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2021 adalah 98,55, dengan pencapaian sesuai target atau melebihi target untuk 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama yaitu: IKU (2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; IKU (3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; IKU (4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; IKU (5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; IKU (6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; IKU (8) Hasil Evaluasi AKIP; IKU (9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; IKU (11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; IKU (12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi dan IKU (13) Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran.

Selain IKU yang pencapaian sesuai target atau melebihi target, terdapat 3 (tiga) IKU yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
3. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;

Hal tersebut mempengaruhi capaian target kinerja secara keseluruhan pada Tahun 2021 yang menunjukkan kecenderungan sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Permasalahan dan kendala utama yang menjadi penyebab tidak tercapainya beberapa target IK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Realisasi Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan berdasarkan hasil evaluasi Direktorat EPP, sampai dengan Triwulan IV atau Semester II 2020 belum mencapai target 100%, walaupun pemenuhan QC dan QA sudah sebesar 100% untuk setiap kegiatan pemeriksaan, namun berdasarkan evaluasi Dit EPP untuk tingkat konsistensi dan tingkat akurasi atas LHP yang diterbitkan masih banyak catatan, khususnya atas LHP LKPD TA 2020. Ke depannya akan lebih meningkatkan QC maupun QA khususnya dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan, sehingga tidak terjadi lagi tingkat keakuratan dan tingkat konsistensi yang masih menjadi catatan.

2. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, menurut hasil survei yang dilakukan oleh Dit. PSMK melalui surveyor (pihak ketiga), masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan pegawai di BPK Perwakilan mengenai Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK. Selain itu dalam implementasinya dilapangan, masih belum dapat diimplementasikan sepenuhnya oleh pegawai, karena penilaian tersebut adalah berdasarkan hasil survei kepada pihak eksternal. Ke depannya akan lebih banyak disampaikan pada saat pengarahan Pimpinan dan atau Kepala Perwakilan kepada pegawai khususnya pada saat persiapan pelaksanaan pemeriksaan dan dalam rapat-rapat internal.
3. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, belum mencapai target yang diharapkan yaitu 100%. hal tersebut disebabkan tidak adanya penerapan *Best Practice* yang diusulkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, kedepannya terkait penerapan *Best Practice* akan diterapkan di BPK Perwakilan Jawa Barat akan mengacu kepada kebutuhan yang perlukan di Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang akan melakukan beberapa upaya untuk lebih meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan yaitu dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dalam rangka perbaikan pengelolaan kinerja, meningkatkan SDM pengelola kinerja, dan perbaikan dalam perencanaan.

LAMPIRAN



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Khotib, S.E., M.Si, Ak., CA., CSFA., CPA (Aust.)
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat

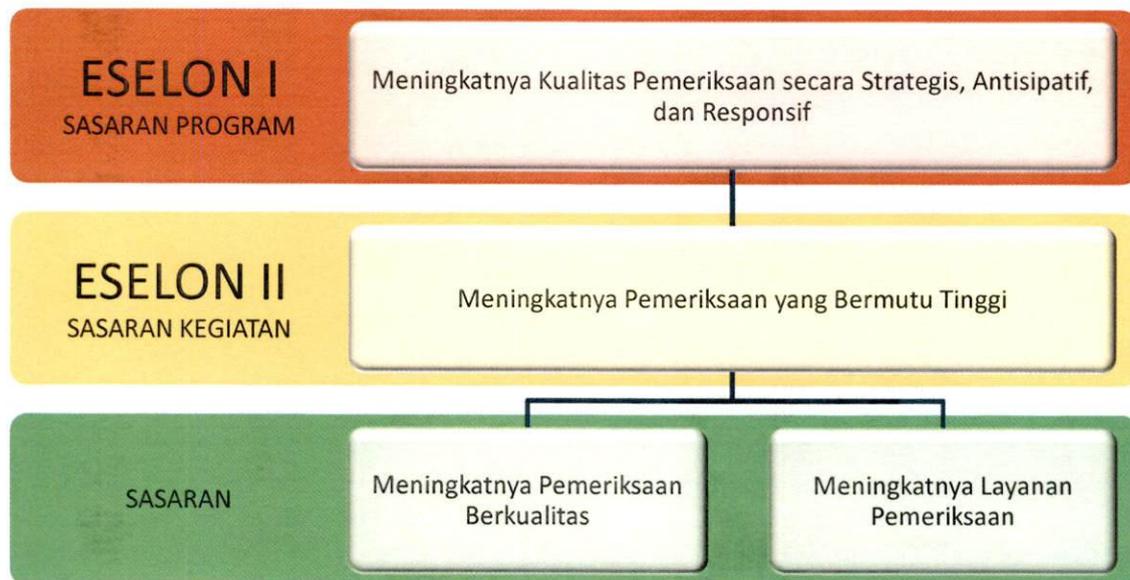
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE., CMA., CA., CSFA., CPA., CFrA.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara V

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.



INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2021

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp40.326.729.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	Rp19.029.954.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	Rp21.296.775.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%

Jakarta, Desember 2020

Pihak Kedua,



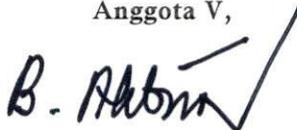
Dr. Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE., CMA., CA., CSFA., CPA., CFA.

Pihak Pertama,

Agus Khotib, S.E., M.Si, Ak., CA., CSFA., CPA (Aust.)

Diketahui oleh:

Anggota V,



Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFA., CGCAE.

Wakil Ketua,



Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFA.

Ketua,



Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFA., CGCAE.

INDIKATOR RINCIAN OUTPUT DAN TARGET TAHUN 2021

Sasaran Kegiatan dan Sasaran		Rincian Output	Indikator Rincian Output	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
		LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol	100%
		LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK	100%
		Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%
		Sumbangan IHPS	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%
		Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%
		Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
		Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	100%
		LHP Interim/Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan	100%
		Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	100%
	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	100%
		Layanan Sarana Internal	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 Paket
			Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Paket
			Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket
Layanan Prasarana Internal		Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Paket	
Layanan Perkantoran		Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%	
	Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%		

Indikator	Kriteria	Catatan
Ketepatan Waktu (Rincian Output)	Batas waktu sesuai berakhirnya ST, POS, P2, atau Disposisi Atasan Langsung=100% Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95% Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja =90% Penyampaian terlambat >10 hari kerja =85%	1. Penilaian dilaksanakan secara mandiri. 2. Penilaian didasarkan atas dokumen/keluaran yang disampaikan kepada atasan langsung eselon 2 atau pihak terkait (tidak termasuk LHP atau dokumen lainnya yang sudah diukur dalam Indikator Sasaran Kegiatan Eselon 2 terkait)

Jakarta, Desember 2020

Pihak Kedua,



**Dr. Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE.,
CMA., CA., CSFA., CPA., CFA.**

Pihak Pertama,



**Agus Khotib, S.E., M.Si, Ak., CA.
CSFA., CPA (Aust.)**